



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2013 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 diubah dan dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai yang tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Bupati/Walikota.

4. Pasal 9 diubah dan dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Pasal 9 diubah dan dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 2 September 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

(1 on)

| SUB SEKTOR | UREA | SP-36 | NPK | ZA | ORGANIK |
|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| TANAMAN PANGAN | 13.048 | 3.452 | 8.877 | 503 | 2.057 |
| HORTIKULTURA | 2.466 | 674 | 1.464 | 30 | 421 |
| PETERNAKAN | 426 | 63 | 200 | 8 | 60 |
| PERKEBUNAN | 2.658 | 456 | 2.299 | 56 | 415 |
| PERIKANAN | 402 | 55 | 160 | 3 | 47 |
| JUMLAH | 19.000 | 4.700 | 13.000 | 600 | 3.000 |

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 September 2014
SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

| JENIS PUPUK : ORGANIK | | (Ton) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NO. | SUB SEKTOR | JUMLAH | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES |
| 1 | TANAMAN PANGAN | 2.057 | 169 | 149 | 201 | 185 | 221 | 257 | 168 | 208 | 134 | 135 | 112 | 118 |
| 2 | HORTIKULTURA | 421 | 23 | 23 | 43 | 36 | 46 | 35 | 46 | 42 | 31 | 33 | 31 | 32 |
| 3 | PETERNAKAN | 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 4 | PERKEBUNAN | 415 | 25 | 22 | 21 | 37 | 43 | 44 | 39 | 45 | 30 | 46 | 32 | 31 |
| 5 | PERIKANAN BUDIDAYA | 47 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| JUMLAH | | 3.000 | 224 | 205 | 274 | 264 | 320 | 342 | 262 | 305 | 203 | 223 | 188 | 190 |

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
SUB SEKTOR (TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA

| No. | Kabupaten/Kota | Total (Ton) | Kebutuhan Pupuk (Ton) | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1. | MINAHASA | 650 | 36 | 24 | 67 | 40 | 45 | 79 | 52 | 100 | 51 | 55 | 50 | 51 |
| 2. | MINAHASA UTARA | 150 | 7 | 10 | 9 | 17 | 15 | 19 | 19 | 27 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 3. | MINAHASA SELATAN | 680 | 50 | 29 | 62 | 58 | 116 | 109 | 51 | 50 | 40 | 43 | 41 | 31 |
| 4. | MINAHASA TENGGARA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5. | BOLAANG MONGGONDOW | 700 | 59 | 60 | 50 | 51 | 55 | 72 | 67 | 62 | 59 | 64 | 48 | 53 |
| 6. | BOLMONG TIMUR | 300 | 25 | 36 | 38 | 36 | 33 | 27 | 25 | 28 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| 7. | BOLMONG SELATAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | BOLMONG UTARA | 136 | 20 | 18 | 9 | 25 | 18 | 4 | 15 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| 9. | SANGIHE | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 10. | TALAUD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | SITARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | MANADO | 50 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 13. | BITUNG | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | TOMOHOH | 150 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| 15. | KOTAMOBAGU | 100 | 6 | 5 | 17 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 |
| JUMLAH | | 3.000 | 224 | 205 | 274 | 264 | 320 | 342 | 262 | 305 | 203 | 223 | 188 | 190 |

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 September 2014
SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**SUB SEKTOR : BUDIDAYA PERIKANAN
JENIS PUPUK : ORGANIK**

| No. | Kabupaten/Kota | Total (Ton) | Kebutuhan Pupuk (Ton) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | | |
| 1. | MINAHASA | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2. | MINAHASA UTARA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | MINAHASA SELATAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | MINAHASA TENGGARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | BOLAANG MONGGONDOW | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 6. | BOLMONG TIMUR | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | BOLMONG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | BOLMONG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SANGIHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SITARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | TOMOHON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 47 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |

Diundangkan di Manado
pada tanggal 2 September 2014
SEKRETARIS DAERAH

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

S. R. MOKODONGAN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17